HALAMAN PERSETUJUAN

Perpustakaan Unika

PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) SEBAGAI BAGIAN DARI PERENCANAAN TATA RUANG KOTA DI KOTA SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan

Program Stara Satu (S1) pada Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

Disusun oleh:

Yohana Rosaliawati (07.20.0014)

Semarang, 9 Desember 2011
Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

(Yovita Indrayati, SH., M.Hum)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2011

Perpustakaan Unika

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Yohana Rosaliawati

NIM : 07.20.0014

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : ……

Susunan Dewan Penguji :

1. …… (……..)
2. …… (……..)
3. …… (……..)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum

Pada tanggal : ……..

B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

Perpustakaan Unika

ABSTRAKSI

Sebuah kota besar terutama kota Semarang pastinya ditempati penduduk yang padat, dan tidak semua orang yang ada di Semarang merupakan penduduk asli Semarang, tak jarang mereka berasal dari luar kota Semarang. Kepadatan penduduk tersebut tidak diiringi dengan pertambahan lapangan pekerjaan. Hal ini memunculkan kreatifitas seseorang untuk memulai membuka usahanya sendiri. Usaha yang dipilih kebanyakan membuka usaha sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). Pemerintah daerah kota Semarang memiliki pendapatan dari berbagai macam aspek salah satunya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL), namun seiring berkembangnya waktu muncul berbagai macam Pedagang Kaki Lima (PKL) di tempat yang tidak diijinkan oleh pemerintah dan hal ini menjadi masalah bagi pemerintah karena mengganggu tata kota, kenyamanan, dan keamanan pengguna jalan di Kota Semarang. Pada dasarnya kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) telah lama menjadi bagian dari kota Semarang, dimanakehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) tetap saja memunculkan dampak positif maupun negatif, karena keberadaannya telah mengganggu tata kota Semarang dikarenakan lokasi perdagangan para Pedagang Kaki Lima (PKL) mayoritas berada di pusat kota yang menimbulkan dampak negatif. Tindakan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar peraturan dengan membuka usahanya di sembarang tempat inilah yang selalu menimbulkan masalah khususnya yang dibahas dalam penelitian ini Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu penulisan yang menggambarkan suatu peraturan pemerintah dalan tulisan ini adalah Perda No 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berlaku. Adapun metode pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi pada obyek penelitian dan melalui wawancara, sedangkn metode analisis data yang digunakan adalah empiric kualitatif.

Tindakan PKL yang melanggar peraturan dengan membuka usahanya di sembarang tempat inilah yang selalu menimbulkan masalah. Pemerintah melakukan berbagai upaya guna mengatur Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan melakukan berbagai upaya guna mengatur PKL dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yakni Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Lahan PKL), dan Perda No. 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL). Selain mengeluarkan peraturan pemerintah juga membuat sentra-sentra PKL, dan memindahkan PKL yang berada di jalan protocol ke lokasi sesuai dengan SK Walikota No. 511.3/16 Tahun 2001 tentang Penetapan Lahan / Lokasi Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Semarang.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menyimpulkan bahwa dalam kenyataannya masih banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pedagang Kaki Lima (PKL). Sebagian Pedagang Kaki Lima (PKL) mengetahui bahwa tempat yang digunakannya untuk berjualan itu bukanlah tempat untuk berjualan / dilarang pemerintah untuk dijadikan tempat berjualan, tetapi Pedagang Kaki Lima (PKL) tetap berjualan di tempat tersebut. Hal ini disebabkan karena Pedagang Kaki Lima (PKL) menganggap bahwa tempatnya berjualan tersebut tepat untuk berjualan dan tidak tahu harus pindah kemana. Masalah ini pemerintah baiknya lebih melakukan sosialisasi ke PKL tentang peraturan PKL yang ada dan mengarahkan PKL untuk menempati lokasi yang telah ditentukan.

Kata kunci : Pedagang Kaki Lima(PKL), pengaturan PKL, perencanaan tata ruang kota.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Perpustakaan Unika

MOTTO :

1. "Apapun yang terjadi, harus lakukan yang terbaik"
2. Tidak akan pernah menyerah sekalipun jatuh berkali-kali, karena saat jatuh itu justru akan memberi kekuatan lebih besar untuk bangkit dan berusaha lebih keras.

(by : me)

PERSEMBAHAN :

Saya persembahkan Skripsi ini untuk :

1. My inspiration Yesus Kristus
2. My parents and my sisters and brother

KATA PENGANTAR

Perpustakaan Unika

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan dengan baik skripsi ini dengan judul : "Pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) Sebagai Bagian Dari Perencanaan Tata Ruang Kota Di Kota Semarang". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat terselesaikannya program sarjana strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata Semarang.

Dalam penulisan ini, penulis ingin menggambarkan mengenai pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam rencana penataan ruang Kota Semarang. Pada awalnya Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak masuk dalam rencana penataan ruang, namun di kemudian hari pemerintah (dalam hal ini pemerintah Kota Semarang) mengeluarkan kebijakan guna mengatur Pedagang Kaki Lima (PKL) yang makin bertambah banyak. Kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan peraturan yang mengatur tentang Pedagang Kaki Lima (PKL), peraturan yang dikeluarkan pemerintah yakni salah satunya Perda No. 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL). Perda No. 11 Tahun 2000 ini mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) seperti hak dan kewajiban pemerintah dan Pedagang Kaki Lima (PKL), larangan, pembinaan, pengaturan tempat serta retribusi. Sekalipun ada peraturan yang mengatur Pedagang Kaki Lima (PKL), kenyataannya masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pedagang Kaki Lima (PKL) maupun oleh pemerintah. Pelanggaran yang dilakukan seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sembarang tempat, juga berjualan di sarana umum, dan di ruang terbuka hijau (RTH), serta pemerintah yang kurang tegas dalam pelaksanaan pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Sehubungan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya keterbataan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman dalam penulisan skripsi ini, sehingga penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Dr.Y. Bagus Wismanto, M.Si, selaku Rektor Universitas Soegijapranata Semarang.

Perpustakaan Unika

2. Bapak Valentinus Suroto, SH.,M.Hum, selaku Dekan Faultas Hukum Universitas Soegijapranata Semarang periode 2007-2011.
3. Ibu B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata Semarang.
4. Bapak L. Eddy Wiwoho, SH., MH, selaku Dosen Wali yang telah banyak memberi bimbingan dan semangat selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata Semarang.
5. Ibu Yovita Indrayati, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan, pengarahan, kritikan dan semangat dengan penuh kesabaran kepada penulis.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan pengajaran selama masa studi penulis.
7. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata Semarang (Mas Sabar, Bu Rini, dan Mas Udik) yang telah membantu dalam urusan adminidtrasi dan perijinan sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi.
8. Seluruh karyawan perpustakaan Universitas Soegijapranata Semarang yang telah membantu menyediakan sarana penunjang dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak M. Lutfi Eko.Nugroho., ST, selaku staf BAPPEDA Kota Semarang Bidang Tata Ruang dan staf yang lelah berkenan memberikan data-data serta informasi yang diperlukan penulis selama penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Anton Siswartono, selaku Kepala Bidang PKL Dinas Pasar Kota Semarang dan staf yang lelah berkenan memberikan data-data serta informasi yang diperlukan penulis selama penyusunan skripsi ini.
11. Bapak Budiarto Ibnu. S, selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) Kota Semarang dan staf yang lelah berkenan memberikan data-data serta informasi yang diperlukan penulis selama penyusunan skripsi ini.
12. Papa dan Mama (Antonius Sutjipto dan Rita Wignyawati) atas kasih sayangnya dan selalu memberikan bantuan, dorongan serta doa pada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

Perpustakaan Unika

13. Kakak dan adik-adik (Veronica Gratiawati, Florentina Viniawati, dan A Riant Wijaya) atas kasih sayangnya yang telah membantu dan memberi pada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua teman-teman Angkatan 2007, Spongesbob Fam's (Valeria Ayu Iko Riri Roman Bintara Putri, Resa gunawan, Isabela Karisa Widari, dan Katarina Ajeng Sari) atas kekompakan, ketulusan, saran, masukan, dan bantuannya pada penulis selama di UNIKA hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. 25 Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Semarang atas kerjasama dan informasi yang diperlukan penulis selama penyusunan skripsi.

Penulis mengakui skripsi ini masih jauh dari sempuna dan banyak kekurangan baik secara teknis maupun isinya dan sesungguhnya penulis telah berusaha dengan segala kemampuan, namun dengan kerendahan hati penulis mengharapkan semoga skripsi ini tidak akan mengurangi kegunaan dan manfaat bagi pembaca dan masyarakat.

Semarang, ……..

Penulis

DAFTAR ISI

Perpustakaan Unika

HALAMAN PENGESAHAN …….…….. ii

ABSTRAKSI …… iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ……... iv

KATA PENGANTAR ……... v

DAFTAR ISI …….. viii

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 (Perbandingan Kota dan Desa) ……...…… 18
2. Tabel 2 (Tabel Responden PKL) ……..... 58

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 (Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Semarang) ……..…… 41
2. Gambar 2 (Bagan Struktur Organisasi Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) Kota Semarang) ..……...…… 46
3. Gambar 3 (Bagan Struktur Organisasi Dinas Pasar Kota Semarang) …….. 51

DAFTAR PETA

1. Peta 1 (Peta Administrasi Kota Semarang) ……...…... 52
2. Peta 2 (Peta Titik-Titik PKL Kota Semarang) ……. 53

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang …….……. 1
B. Perumusan Masalah ….……. 8
C. Tujuan Penelitian …….……. 9
D. Kegunaan Penelitian ……. 9

Perpustakaan Unika

E. Metode Penelitian ……

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaturan Tata Ruang 11

B. Tata Ruang Kota 17

C. Pedagang Kaki Lima (PKL) 20

D. Pemerintahan ……...…… 22

E. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang 28

BAB III : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum 33

1. Kota Semarang 33

2. Instiusi Pemerintah yang Berkaitan Dengan Penataan PKL 39

a. BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kota Semarang...41

b. Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) Kota Semarang 48

c. Dinas Pasar Kota Semarang 52

3. Peta Lokasi PKL 60

4. Pedagang Kaki Lima (PKL) 62

5. Responden PKL 70

B. Bentuk-Bentuk Peraturan yang Diterbitkan Pemerintah Kota Semarang yang Mengatur Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) Sebagai Bagian Dari Perencanaan Tata Ruang Kota 72

1. Bentuk Peraturan Tentang PKL di Kota Semarang 72

2. Tujuan Pengaturan PKL di Kota Semarang 80

Perpustakaan Unika

C. Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Sebagai Bagi Perencanaan Tata Ruang Kota di Kota Semarang 82

D. Hambatan yang Dihadapi Pemerintah Kota Semarang Dalam Mengatur Pedagang Kaki Lima (PKL) Dan Cara Mengatasi Hambatan yang Dihadapi Pemerintah Kota Semarang Dalam Mengatur Pedagang Kaki Lima (PKL) 87

1. BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kota Semarang 90
2. Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) Kota Semarang 91
3. Dinas Pasar Kota Semarang 92

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 96

B. Saran 98

DAFTAR PUSTAKA 100

LAMPIRAN 103

Perpustakaan Unika

PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) SEBAGAI BAGIAN DARI PERENCANAAN TATA RUANG KOTA DI KOTA SEMARANG

SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan
Program Stara Satu (S1) pada Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata

Disusun Oleh:
Yohana Rosaliawati
(07.20.0014)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2011